

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Kefarmasian

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan dan pelayanan gawat darurat. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna Rumah Sakit termasuk Instalasi Farmasi diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah diperoleh oleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat (Depkes 2008).

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang menyebutkan bahwa Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk itu perlu adanya standar pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari pengguna obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Permenkes, 2016).

Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Dalam pelayanan kefarmasian tidak bisa dipisahkan dari pengendalian perbekalan farmasi yang dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai. Pengendalian perbekalan farmasi dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi untuk memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan. Pengendalian perbekalan farmasi dapat dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap persediaan secara berkala. (Sasongko, 2014)

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu unit di rumah sakit dibawah pimpinan seorang Apoteker yang bertugas dan bertanggung jawab sepenuhnya pada pengelolaan semua aspek yang berkaitan dengan obat yang beredar dan digunakan di rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan petugas penunjang lain, IFRS adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Pekerjaan Kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, farmasi klinik di ruangan. IFRS berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit terutama pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. (Satibi, 2012)

Pengelolaan obat adalah bagaimana cara – cara mengelola tahap – tahap dari kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan saling mengisi sehingga dapat tercapai tujuan pengelolaan obat yang efektif dan efisien agar obat yang diperlukan selalu tersedia pada saat dibutuhkan dalam jumlah dan mutu yang terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu (Somantri, 2013).

Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai tujuan yaitu:

- a. Mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien;

- b. Menerapkan Farmakoekonomi dalam pelayanan
- c. Meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga farmasi
- d. Mewujudkan sistem informasi manajemen berdaya guna dan tepat guna
- e. Melaksanakan pengendalian mutu pelayanan

Pengadaan obat dilakukan oleh IFRS merupakan kegiatan yang bertujuan merealisasikan dari kegiatan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan distributor, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. (Triasari, 2016)

2.2 Distribusi Obat

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. (Permenkes, 2016).

Distribusi obat di rumah sakit merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk tersalurkannya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan menjamin ketersediaan, keamanan, ketepatan waktu yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu pelayanan. Pada penerapannya di Instalasi Farmasi (depo farmasi rawat jalan) masih terdapat kendala pada distribusi dan belum terlaksananya Standar Prosedur Operasional (SPO) yang sudah ditetapkan dimana seringnya terjadi kekurangan atau tidak tersedianya obat pada waktu akan digunakan. Ketersediaan stock obat di depo farmasi rawat jalan mengacu kepada kesesuaian permintaan obat ke Gudang farmasi secara rutin pagi dan siang hari dimana apabila jumlah permintaan obat ke gudang farmasi tidak sesuai dengan jumlah obat dalam resep pada waktu pelayanan maka

akan mempengaruhi waktu tunggu pasien yang merupakan salah satu komponen kepuasan pasien. (Sinuraya, 2013)

Salah satu Rumah Sakit swasta di Bandung yang merupakan rumah sakit type kelas B dan menyelenggarakan banyak pelayanan. Rumah sakit swasta ini mempunyai pelayanan farmasi rumah sakit dengan tujuan menunjang pelayanan kesehatan bermutu dari rumah sakit dimana farmasi rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua perbekalan farmasi yang beredar di rumah sakit. Rumah Sakit swasta ini mempunyai dua Depo Farmasi Rawat Inap dan empat Depo Farmasi Rawat Jalan. Depo Farmasi rawat jalan berada ditiap – tiap gedung yaitu :

- a. Depo Farmasi Y2 berada di gedung Y
- b..Depo Farmasi Anak berada di gedung M
- c. Depo Farmasi E2 berada di gedung EB
- d. Depo Farmasi IGD

Dalam melakukan distribusi obat dan alat kesehatan dari gudang farmasi kesemua depo farmasi, ruang rawat dan semua unit yang ada di rumah sakit,gudang farmasi terdiri dari dua Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dan tenaga penunjang lainnya dengan total lima belas orang dengan pembagian tugas, dua orang menjalankan tugas siang sisanya bertugas pagi

Standar pelayanan minimal di Rumah Sakit salah satunya terkait dengan waktu tunggu pelayanan resep oleh farmasi. Kecepatan pelayanan ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah ketersediaan obat di depo Farmasi. Rumah Sakit swasta ini memiliki beberapa klinik rawat jalan dengan tiga *front office* dimana tiap *front office* terdapat tenaga teknis kefarmasian yang bertugas memberikan informasi harga obat dan mengkonfirmasi ulang obat yang akan dibeli oleh pasien. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga teknis kefarmasian tidak dapat melihat secara fisik obat yang ada di depo farmasi tetapi hanya melalui informasi komputer dimana sering terjadi masalah terkait persediaan obat yang tidak sesuai antara fisik obat dengan data yang ada dikomputer sehingga tidak mencukupi kebutuhan obat dan harus melakukan

permintaan obat terlebih dahulu ke gudang farmasi untuk memenuhi jumlah obat yang dibutuhkan, dan ini akan menambah waktu tunggu pasien.(Satibi, 2012)

2.3 Manajemen Risiko Pengelolaan Sediaan Farmasi

Manajemen Risiko merupakan aktivitas Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan untuk identifikasi, evaluasi, dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan pada pasien, tenaga kesehatan dan keluarga pasien, serta risiko kehilangan dalam suatu organisasi. Risiko yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan perbekalan farmasi antara lain :

- a. Ketidaktepatan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi;
- b. Pengadaan perbekalan farmasi tidak melalui jalur resmi;
- c. Pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang belum/tidak teregistrasi;
- d. Keterlambatan pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi;
- e. Kesalahan pemesanan perbekalan farmasi;
- f. Ketidaktepatan penyimpanan yang berpotensi terjadinya kerusakan dan kesalahan dalam pemberian;
- g. Kesalahan dalam distribusi;
- h. Pemberian label yang tidak jelas atau tidak lengkap;dan
- i. Kehilangan fisik yang tidak mampu telusur.

Risiko yang terjadi dianalisa dan dievaluasi sehingga semua risiko yang terjadi dapat diatasi. (Permenkes, 2016)